



# Buletin Parlementaria

Nomor 1027/I/X/2018 • Oktober 2018



## Empati DPR untuk Akselerasi Pemulihan NTB



Komisi IV Tinjau Kerusakan Pasca Gempa Lombok

# Empati DPR untuk Akselerasi Pemulihan NTB

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap DPR RI bisa terus bekerjasama dengan berbagai lembaga kemanusiaan guna membantu korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai salah satu wujud empati dan keterlibatan dalam akselerasi pemulihan pasca gempa NTB, DPR RI mengadakan Pameran Hunian Sementara (Huntara) bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan seperti Filantrus, Qoloni dan lainnya.**

“Nantinya, Huntara bisa dibangun di lokasi-lokasi terdampak gempa, sehingga bisa membantu saudara-saudara kita memiliki rumah hunian untuk menata kehidupan pasca gempa. Tingginya rasa solidaritas masyarakat harus disyukuri karena menjadi penanda bahwa rasa kebangsaan kita masih utuh tak tercerai-berai,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat membuka pameran Huntara di pelataran Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Kamis (20/9).

Hadir dalam pameran bertajuk “DPR Peduli Huntara for NTB” tersebut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Sekda Kabupaten Sumbawa, NTB Rasyidi, dan Ketua Forum Zakat Bambang Suherman. Selain menggelar pameran, juga dilakukan pemutaran film, lelang foto, penampilan seni, serta diskusi. Pada waktu yang sama akan dihimpun dana atau donasi untuk pembangunan Huntara.

“Kepedihan rakyat adalah kepedihan DPR. Mari kita tunjukkan rasa empati kepada saudara-saudara kita NTB yang dilanda musibah dengan memberikan perhatian, kepedulian dan bantuan,” kata politisi Partai Golkar ini.

Bamsoet pun membeli dua foto yang dipamerkan dengan total harga Rp 75 juta. Dana tersebut akan disumbangkan untuk membangun Huntara di NTB. Sebelum menyelenggarakan pameran Huntara, DPR RI juga telah melakukan berbagai aksi dan kegiatan lainnya. Mulai dari kunjungan ke lokasi terdampak, mengirim relawan

dan sumbangan, serta memastikan pemerintah bekerja maksimal dalam membangun NTB pasca gempa.

“Dari laporan terakhir yang disampaikan kepala BNPB dalam rapat konsultasi, terdapat 167.961 rumah yang dilaporkan rusak dan pengungsi berjumlah 445.343. Saat ini sudah ada 5.583 rekening yang terisi untuk penanganan rumah rusak berat. Kita juga mendukung BNPB yang mengajukan anggaran sebesar Rp 4,1 triliun untuk membangun 84 ribu rumah yang rusak,” jelas Bamsoet.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengatakan, pameran “DPR Peduli Huntara for NTB” ini adalah ikhtiar berlanjut DPR RI atas kepedulian terhadap masyarakat NTB, yang belum lama diguncang gempa bumi berturut-turut.

“Ini adalah ikhtiar berlanjut kita yang terus dilakukan, karena kita tahu dampak dari gempa yang datang beruntun di NTB. Dan, dalam acara



Foto: Runtir/Rni

ini kita juga sengaja mendatangkan pihak-pihak terkait di NTB yang sangat paham akan daerahnya,” sebut Fahri saat menjadi pembicara pada ekspo Hunian Sementara (Huntara) ini.

Karena menurut legislator daerah pemilihan NTB itu, pihak-pihak seperti gubernur, walikota maupun camat dan lurah di seluruh wilayah NTB yang lebih merasakan penderitaan rakyatnya. “Sebab, ada yang terus menerus kita tidak paham di luar, utamanya yang terkait dengan instruksi presiden. Apalagi instruksi gubernur yang baru dilantik kemarin,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Fahri, pemerintah daerah setempat yang mesti



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meninjau pameran "DPR Peduli Hurlanta for NTB" di pelataran Gedung Nusantara III DPR RI



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Sofyan Efendi

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

**ANGGOTA REDAKSI**  
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske  
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,  
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,  
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,  
Azka Restu Fadilah, Gerald Opie

**ADMINISTRASI**  
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

didengar aspirasinya, karena mereka yang punya rakyat. Dengan adanya masukan dari mereka, maka dapat membuat desain dan mencari solusi bagi masyarakat Lombok dan Sumbawa yang rumahnya terkena dampak gempa.

“Karena, ada kesan pemerintah *enggak* punya uang. Maka sampai rapat konsultasi dengan 16 kementerian beberapa waktu lalu, begitu saya kejar memang *enggak* bisa jawab problem ini. Sebenarnya uangnya berapa dan niat *enggak* membiayai?” ungkapnya lagi.

Sementara itu data yang didapatkan di lapangan, masyarakat sederhananya meminta uang ditransfer, dan modalnya

untuk membuat rumah. Apalagi masyarakat sudah diverifikasi pemda, kemudian diambil gambaran kondisi rumah mereka. Dan hasil verifikasi sudah ditandatangani bupati dan dikirim ke pusat.

“Memang uangnya sudah ditransfer, tapi uang tidak bisa dicairkan. Makanya saya bilang, faktanya untuk rumah belum ada uang,” cetusnya seraya mengimbau bagi seluruh masyarakat agar menyumbangkan dananya untuk membantu masyarakat NTB guna membangun rumahnya kembali. ■ eps/sf



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Anggota DPR RI menerima cenderamata dari *Head of National Defense Collage* Bangladesh Mayor Jenderal Syafiudin Ahmed

## Fadli Zon Terima *National Defense Collage* Bangladesh

**Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan *National Defense Collage* atau Lembaga Pertahanan Bangladesh untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam isu-isu politik dan ekonomi. Delegasi Bangladesh begitu tertarik bertanya banyak hal tentang politik dan ekonomi Indonesia.**

Delegasi Bangladesh yang dipimpin Mayor Jenderal Syafiudin Ahmed membawa sekitar 23 orang yang terdiri dari pejabat sipil dan militer Bangladesh. Sementara Fadli didampingi Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dan Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono.

“Mereka datang ke Indonesia bersama pejabat sipil dan militer. Mereka ingin mengetahui bagaimana sistem demokrasi di Indonesia bekerja, terutama di DPR.

Mereka juga menginginkan hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Bangladesh,” jelas Fadli usai pertemuan yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Dari sistem politik hingga posisi Indonesia dalam perang dagang Amerika-China ditanyakan delegasi Bangladesh. Fadli mengemukakan, politik luar negeri Indonesia sangat mengedepankan kepentingan nasional. Dan garis politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah bebas aktif. Delegasi Bangladesh sangat

tertarik dengan perkembangan politik mutakhir di Tanah Air.

Dalam kesempatan itu, legislator Partai Gerindra itu juga menyinggung soal isu Rohingya di mana Bangladesh menjadi negara penampung. Fadli menyampaikan, masalah pengungsi Rohingya jadi masalah besar bagi Pemerintah Bangladesh. Indonesia sudah berjuang menyuarakan di forum-forum internasional agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negaranya di Myanmar dengan damai.



Foto: Kresno/Rni

# Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga terlibat dalam penyelenggaraan badan tersebut. Berdasarkan laporan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku tengah mengalami defisit arus kas mencapai Rp 16,5 triliun. Dengan rincian, rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus *carry over* Rp 4,4 triliun.

“Saya sampaikan bahwa DPR yang menginginkan masalah Rohingya cepat selesai, agar mereka bisa kembali ke Myanmar dan mendapat tempat yang layak di sana. Kekerasan-kekerasan yang terjadi agar dihentikan. Itu telah menelan banyak korban bagi etnis Rohingya. Bangladesh jadi negara yang terkena dampak paling besar. Tentu jadi beban mereka. Ada satu juta pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh,” ungkap Fadli.

Kini, pemerintah Bangladesh harus menanggung semua kebutuhan harian pengungsi, baik makan, sanitasi, dan lain-lain. Pertumbuhan kamp pengungsinya begitu cepat. Tenda-tenda pengungsian begitu banyak berdiri. Tapi, hingga kini belum ada perkembangan penanganan yang berarti di kamp-kamp pengungsian. “Sejauh ini Bangladesh termasuk negara yang luar biasa baiknya untuk menampung pengungsi,” imbuh Fadli kepada **Parlementaria**, usai pertemuan.

■mh/sf



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Foto: Iwan/Rni

“Tidak ada jalan lain terkecuali pemerintah keluarkan uang untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan,” kata Fahri ketika dihubungi wartawan, Jumat (21/9). Menurutnya, dengan adanya kucuran dana dari pemerintah itu, maka yang bekerja pada lembaga-lembaga maupun pada institusi pemerintahan bisa bekerja kembali, seperti Rumah Sakit, Klinik, dokter, para medis dan sebagainya.

Menurut Fahri, langkah ini menjadi solusi yang baik. Mengingat pelayanannya memang itu diperlukan itu setiap hari oleh rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang bahwa harus diadakan terus. Hal ini juga sesuai janji Presiden terkait arti ‘Indonesia Sehat’ itu harus bisa terselenggara, apabila ada

pembayaran *cash* kepada BPJS diselesaikan.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menambahkan, untuk solusi jangka panjangnya, pemerintah bisa mencari skenario yang bisa dibuat, misalnya skenario investasi, skenario pengelolaan aset dan sebagainya. Tetapi jangan mengurangi hak-hak dan jatah-jatah masyarakat di dalam pelayanan kesehatan.

“Saya kira itu harus segera dan mendesak. Pemerintah juga harus jujur secara terbuka ada uang atau tidak. Karena kalau tidak ada, dan ini dibiarkan bisa *chaos* nanti di bawah. Di daerah-daerah pelayanan pada masyarakat dipotong-potong, hingga bisa memunculkan kegelisahan yang terus menerus tanpa kepastian,” pungkash politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. ■ eps/sf

# DPR dan Parlemen Norwegia Samakan Visi Hadapi Perubahan Lingkungan



Foto: Jaka/Rni

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (tengah) saat menggelar pertemuan dengan Delegasi Parlemen Norwegia.

**Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima kunjungan Delegasi Parlemen Norwegia untuk membahas isu perubahan lingkungan di dunia. Ia mengaku bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang lingkungan dan memperkuat kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.**

“Norwegia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat *concern* terhadap lingkungan. Negara yang sangat banyak mengeluarkan biaya bahkan memberikan *funding* yang banyak untuk pengelolaan lingkungan,” ujarnya sesuai menerima Delegasi Parlemen Norwegia di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).

Anggota dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sangat efektif, karena diketahui Indonesia dan Norwegia memiliki kepedulian yang sama di bidang lingkungan dan energi terbarukan. Sehingga kemungkinan besar nantinya akan tercipta kerja sama yang baru dengan Norwegia di bidang lingkungan tersebut.

“Pertemuan ini sangat berkembang,

karena saya melihat kepedulian yang sama dengan Norwegia bahwa energi terbarukan itu penting untuk mengontrol lingkungan di dunia. Kita bisa lihat bahwa Norwegia memiliki teknologi yang mumpuni dalam hal pemanfaatan tenaga angin. Jadi ini bisa menjadi hal positif apabila kedua negara ini bisa terus bekerja sama,” tutur legislator dapil Jawa Tengah I itu.

Dalam bidang energi terbarukan, menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu, Indonesia patut berbangga hati karena mendapat apresiasi langsung dari parlemen Norwegia dalam bidang tenaga panas bumi (*geothermal*). Ia menyatakan pujian tersebut dilontarkan sudah berdasarkan dengan fakta yang ada

di lapangan.

“Delegasi Norwegia ini juga mengapresiasi kita yang saat ini berada di posisi ke dua dalam bidang pemanfaatan energi *geothermal*. Seperti diingat, fokus kami ketika diangkat menjadi Wakil Ketua DPR adalah *geothermal* dan saat ini kita sudah menduduki posisi ke-2 di dunia untuk pemanfaatan *geothermal*,” tambahnya.

Dalam pertemuan ini memang kedua negara tersebut saling memperkenalkan teknologi yang sedang dikembangkan oleh masing-masing negara, “Ini adalah merupakan *effort* kita untuk menuju energi yang bersih lingkungan yaitu energi terbarukan,” imbuh Agus.

Kunjungan Delegasi Norwegia ke Indonesia adalah untuk melihat praktik dan implementasi di bidang kehutanan dan *land based sector* (termasuk *peatland*), serta pengelolaan energi berkelanjutan. Rombongan dipimpin oleh Anggota Parlemen Norwegia Barth Eide dan sempat melakukan kunjungan lapangan ke Kalimantan Barat, sehari sebelum diterima Pimpinan DPR RI. ■ eps/sf



Foto: Ojij/Rni

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto melakukan pertemuan dengan Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha beserta jajarannya

## Kehadiran Lembaga Sertifikasi Profesi Pengadaan Menjadi Suatu Keniscayaan

**Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha. Didampingi Inspektur I Dewi Barliana dan Inspektur II Ign. Bambang Rudianto serta beberapa auditor, Totok, panggilan akrab Setyanta, memperkenalkan adanya lembaga sertifikasi profesi tentang pengadaan.**

“Lembaga itu berkaitan dengan tugas Pak Totok sebagai Inspektur Utama. Saya menyambut baik, karena ke depan sertifikasi seperti itu menjadi keniscayaan,” ungkap Utut usai pertemuan di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9).

Dengan demikian, lanjut Utut,

dengan adanya lembaga itu pula maka *performance* diatur dengan baik dan semuanya akan diatur lebih baik.

Kehadiran Irtama didampingi beberapa tokoh yang berlatar belakang akuntan, seperti Taufik Efendi yang berlatar belakang tokoh reformasi birokrasi, dan Adnan Pandupraja mantan Wakil Ketua KPK.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator BURT dan BAKN ini, membuat sistem administrasi lebih baik itu sebuah keniscayaan. Ia menampik kalau kehadiran Irtama berkaitan RAPBN 2019 yang akan disahkan pada bulan Oktober mendatang, Lembaga sertifikasi pengadaan dimaksudkan agar ada orang yang paham masalah-masalah teknis.

Dalam pengadaan barang, kata legislator PDI Perjuangan itu, juga perlu dibekali ilmu, dan mereka mempunyai ilmunya. “Dalam pertemuan ini, Pak Irtama memperkenalkan adanya lembaga sertifikasi profesi terkait pengadaan,” pungkask Utut. ■ mp/sf

# Komisi II Soroti Pelayanan Publik Kalsel Untuk Penyandang Disabilitas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah permasalahan terkait pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya mengenai sarana dan prasarana (sarpras) bagi masyarakat penyandang disabilitas. Menurutnya, negara harus hadir serta menjamin hak-hak masyarakat berkebutuhan khusus itu.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera (kedua dari kanan) memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Kalsel

Foto: Anne/Rni

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, saat ini Komisi II DPR RI sedang membahas Panja Pelayanan Publik, yaitu untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, termasuk kepada penyandang disabilitas. Sebab, disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia.

Diketahui, Kalsel merupakan salah satu provinsi yang populasi penyandang disabilitasnya tertinggi di Indonesia. Saat ini setidaknya ada 19.000 ribu masyarakat berkebutuhan khusus di provinsi seribu sungai ini. Karenanya, Mardani berharap pemerintah pusat maupun daerah, melalui kebijakannya bisa mengayomi dan mengakomodir hak-hak kaum disabilitas.

Untuk mendukung hal tersebut, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran yang lebih besar sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada disabilitas. "Setelah ini, kami akan buat rekomendasi di pusat agar alokasi dana sosial Kalsel bisa ditingkatkan," tandas politisi dapil Jawa Barat itu. ■ ann/sf

“ Kita memberikan perhatian yang sangat tinggi, khususnya pada kinerja Pemprov Kalsel dalam melayani masyarakat,” ucap Mardani saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan

Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kalsel Siswansyah dan SKPD terkait di Kantor Sekda Provinsi Kalsel, Banjar Baru, Kamis (20/9).

# Komisi II Dukung Gubernur Sulut Tegas Jalankan UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Evert Erenst Mangindaan mendukung sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulut tegas terkait polemik data pemilih di Kota Bitung, Sulut, yang sebagian merupakan warga negara asing (WNA). Ia pun mendukung sikap Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang menyatakan bahwa KPU Sulut harus tegas menjalankan UU Pemilu untuk mengatasi permasalahan itu.



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menerima cenderamata dari Gubernur Sulut

Foto: Ayu/Rni

“ Pemilih yang berhak mengikuti Pileg dan Pilpres merupakan warga Indonesia. Sementara *stateless* atau yang bukan WNI tidak berhak mengikuti Pileg dan Pilpres, walaupun mereka sudah tinggal di wilayah Indonesia cukup lama. Kami sangat mendukung ketegasan dari Gubernur Sulut itu,” papar Mangindaan usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan KPUD, Bawaslu dan Gubernur Sulut beserta jajarannya di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (20/9).

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Sulut mengungkapkan kekhawatirannya akan

# Komisi II Soroti DPT Ganda dan Perekaman Data KTP-el Sumut

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kesiapan dan Persiapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai, kesiapan Provinsi Sumatera Utara menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 hampir sama dengan persoalan dengan provinsi lainnya. Seperti masih adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, dan persoalan warga yang belum mendapatkan perekaman data KTP-elektronik (KTP-el).**

Hal itu diungkapkan Ninik, sapaan akrab Nihayatul, usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur

Provinsi Sumatera Utara Musa Rajekshah, beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumut beserta jajarannya di ruang rapat Kaharudin Nasution, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (20/9).

“Soal DPT ganda, tentunya kita sudah melayangkan permintaan dan juga kesepakatan bersama KPU, bahwasanya kita memberikan waktu 2 bulan untuk nantinya DPT ganda itu bisa diminimalisir. Kita berharap DPT ganda di Sumut ini juga

terjadinya kisruh menjelang Pileg dan Pilpres di Kota Bitung yang notabene merupakan salah satu kota yang banyak dihuni oleh WNA, khususnya dari Filipina. Bertahun-tahun mereka tinggal di kota itu yang merupakan wilayah Indonesia dan berbaur dengan WNI. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang sudah merasa bagian dari Indonesia.

Meski demikian, Mangindaan menilai KPU harus tunduk pada undang-undang yang berlaku. Jika orang tersebut bukan WNI, harus dibuktikan dengan adanya KTP-elektronik ataupun dokumen pendukung lainnya yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), maka orang tersebut tidak berhak mengikuti pesta demokrasi di Indonesia, atau tidak berhak menjadi pemilih.

Hal tersebut pun diamini oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali yang memimpin Tim Kunspek ke Sulut tersebut, dan diikuti Anggota Komisi II DPR Azikin Solthan, Komarudin Watabun, Dwi Ria Latif, Eddy Kusuma Wijaya, Tabrani Maamun, Soetriyono, Rohani Vanath dan Andi Mariatang. ■ ayu/sf



Tim Kunker Komisi II DPR menerima cenderamata dari Pemprov Sumut

Foto: Nacya/Rri

bisa selesai,” kata Ninik.

Lebih lanjut politisi PKB itu juga mengkritisi persoalan perekaman data KTP-el oleh Disdukcapil dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh KPU Sumut pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lalu, terdapat 1 juta masyarakat yang belum mendapatkan perekaman data KTP-el. Padahal persyaratan mengikuti Pilkada, Pileg dan Pilpres adalah sudah melakukan perekaman data KTP-el.

Sehingga, Ninik berharap untuk Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, tidak ada lagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumut, yang tidak memiliki hak pilih hanya karena persoalan KTP-el. “Oleh karena itu, kita mendorong Kemendagri agar semakin proaktif untuk bisa melaksanakan perekaman KTP-el ini, karena ini menjadi langkah konkret kita untuk administrasi kependudukan di Indonesia,” tegas politisi dapil Jawa Timur ini.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dapil Sumatera Utara III Rambe Kamarul Zaman menilai, persoalan DPT ganda harus diupayakan oleh kementerian terkait. Menurutnya, jika

terjadi pendataan yang konkret dari bawah, maka tidak ada lagi istilah DPT ganda. Sehingga, Rambe pun mendorong Kemendagri, KPU, Bawaslu, hingga Disdukcapil untuk segera menyelesaikan pendataan KTP-el dengan sisa waktu sekitar 2,5 bulan lagi.

“Yang tidak punya KTP-el atau yang belum merekam data yang harus memang didorong untuk bisa tercatat jadi pemilih itu. DPT yang berkesinambungan ini yang harus dievaluasi oleh penyelenggara Pemilu, dengan dorongan oleh pemerintah. Di Sumut, Pak Wagub sudah menyatakan bersedia untuk itu. Dan juga masyarakat harus punya kesadaran, setelah terdaftar secara terang ada mekanismenya, maka masyarakat yang bersangkutan pun harus melaksanakan partisipasinya secara positif,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Sedangkan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mendorong dan mendukung upaya yang nantinya akan diambil oleh Komisi II DPR RI dalam memberikan hak pilih kepada masyarakat Sumut. Mengingat permasalahan lalu yang terjadi pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilkada) adalah berkaitan dengan KTP-el, akibat tidak tersedianya blangko di kabupaten dan kota tempat masyarakat memilih.

“Mudah-mudahan kunjungan Komisi II DPR RI ini bisa memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang ada. Kita harapkan Pileg dan Pilpres ini suasana kondusif, karena memang waktunya serentak. Semoga di Sumut tidak terjadi permasalahan yang mengakibatkan sesuatu hal yang merugikan kita. Pemerintah Provinsi Sumut pasti akan sangat mendukung dan membantu dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres nanti,” kata Wagub Sumut.

Kunspek Komisi II DPR RI ke Sumut ini juga diikuti oleh Anggota Komisi II DPR RI Agus Siswanto, Arif Wibowo, dan Henry Yosodinigrat dari F-PDI Perjuangan, Dadang S. Muchtar, dan Firman Soebagyo dari F-PG, Sareh Wiyono (F-Gerindra), M. Afdzal Mahfuz (F-PD), Sarwindah (F-PAN), Chairul Anwar (F-PKS), Achmad Baidowi (F-PPP), Kresna Dewanata Phrosakh (F-NasDem), dan Rufinus Hotmalulana Hutauruk (F-Hanura). ■ ndy/sf

# Komisi IV Mediasi Permasalahan PT. BTID dan Masyarakat Adat

**Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI menggelar mediasi tentang pembangunan mulut kanal di Pantai Utara Serangan, Denpasar, Provinsi Bali antara pihak pengembang PT. Bali Turtle Island Development (BTID) dengan masyarakat adat Bali. Pasalnya, hingga kini berbagai penyelesaian tidak menemukan titik terang antar keduanya.**

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan yang juga Ketua Kunspek ke Provinsi Bali menyebut bahwa sebenarnya masyarakat adat hanya mempermasalahkan pembangunan mulut kanal yang melewati akses masyarakat biasa melakukan kegiatan pembersihan diri (melasti) dan juga melakukan kegiatan melaut.

“Masyarakat berharap kawasan wisata yang dibangun masih terbuka untuk



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan (kedua dari kiri) tengah berbincang dengan warga dan pengembang di Bali

Foto: Azka/Rni

masyarakat di sini, agar punya akses untuk nelayan dan beribadah. Mereka bukannya tidak setuju pembangunan kawasan wisata di daerah tersebut, tetapi penentuan titik-titik jembatan itulah yang akan menghubungkan antara daerah

pariwisata dan daerah non pariwisata yang ditinggali oleh masyarakat,” jelas Daniel usai mediasi antara PT. BTID dengan masyarakat adat di Denpasar, Bali, Rabu (19/9).

Politisi F-PKB itu mengatakan bahwa

## MKD Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara di Sulsel

**Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) melakukan sosialisasi kode etik dan tata beracara MKD kepada Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel). Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan, pertemuan ini dalam rangka memperbaiki institusi dewan, supaya kehadiran DPR RI dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.**

“DPR saat ini sudah terbuka terhadap informasi-informasi dari masyarakat, dan juga dapat menerima kritik dari masyarakat dalam konteks perbaikan,” kata Sudding, usai pertemuan dengan Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Polisi Umar Septono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Tarmizi beserta jajarannya, di Markas Polda (Mapolda) Sulsel, Makassar, Kamis (20/9).

Dalam keterangannya, kunjungan kerja kali ini ke jajaran Polda dan Kejati Sulsel, MKD mendapat masukan dan bersinergi, serta membangun kerja sama yang baik dalam rangka menjaga hal-hal, seperti tindakan atau perilaku di luar kepatutan dan kepantasan yang dilakukan oleh para Anggota Dewan.

“Sedapat mungkin itu disampaikan ke MKD, supaya kita bisa melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan



Tim Kunjungan Kerja MKD DPR RI berfoto bersama Kapolda Sulsel dan Kajati Sulsel

Foto: Agung/Rni

setelah pertemuan antara kedua belah pihak, sudah ada jalan keluar. Semula masyarakat yang ingin melaut atau melakukan kegiatan Melasti melewati kawasan wisata tersebut akan dibuatkan jembatan untuk melewati mulut kanal. Tinggal nanti akses menuju daerah wisata yang dibentuk jembatan. “Tinggal dimusyawarahkan dalam suatu poin-poin kesepakatan. Dalam konsep nelayan, kalau mereka tidak bisa mengakses sebagian wilayah, apa kompensasinya. Jadi hal-hal itu saja yang dipastikan,” imbuhnya.

Daniel menambahkan bahwa pihak pengembang harus bisa memastikan, jika ini terbangun dengan baik, masyarakat tidak tersingkir, dan pendapatan masyarakat semakin baik. Pada titik-titik tertentu yang memang nelayan sudah tidak bisa mengakses lagi, ada kompensasi dalam bentuk tempat untuk mereka berjualan. Ia pun berharap pembangunan daerah wisata tidak menggerus pendapatan masyarakat, namun justru akan meningkatkannya.

“Jangan sampai pembangunan ini tidak berjalan, karena konstruksi pembangunan saat ini sudah menutup akses masyarakat yang ingin melaut. Tentu ini akan terus kita kawal proses pembangunannya hingga selesai,” tutup politisi dapil Kalimantan Barat itu. ■ azk/sf

yang di luar kepatutan dan kepantasan sebagaimana norma-norma di tengah-tengah masyarakat,” ungkap politisi Partai Hanura itu.

Terkait dengan adanya usulan bahwa proses tata beracara MKD akan melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan, Sudding menjelaskan, hal ini sangat baik dalam pembentukan panel. Menurutnya, itu bisa melibatkan Kapolda atau Kejati dimana Anggota Dewan itu berasal, kala Anggota Dewan itu diproses di MKD, karena mereka lebih memahami konteks masalahnya.

Menurutnya, hal ini tentang obyektifitas dan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam hal keputusan MKD. “Saya kira untuk lebih pada letak obyektifitasnya terhadap keputusan yang diambil oleh MKD, ya sedapat mungkin jajaran Polda dan Kejaksaan Tinggi setempat bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan di MKD,” tegas politisi dapil Sulawesi Tengah itu. ■ as/sf



Foto: Hendra/Rni

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena saat meninjau Gudang Bulog Kota Sorong, Papua Barat.

## Ketersediaan Beras Papua Barat Dipastikan Aman

**Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menegaskan bahwa stok beras untuk daerah Papua Barat bisa dipastikan aman. Temuan ini didapatkan usai Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Sorong, Papua Barat, untuk memastikan ketersediaan beras.**

“Alhamdulillah stok beras di Papua Barat aman untuk jangka waktu yang panjang hingga akhir tahun 2018 ini. Kita apresiasi kepada pemerintah yang telah menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat Papua Barat,” ungkap Michael di sela-sela memimpin Tim Kunspek meninjau Gudang Bulog Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (19/9).

Ia menuturkan, peran Bulog dalam menjaga stabilitas bahan pokok amatlah penting, sehingga kinerja yang baik ini harus dijaga terus. Tak hanya itu, Michael juga mendorong terus kesiapan Bulog dalam menghadapi hari hari besar yang akan dilewati pada akhir tahun 2018, seperti Natal dan Tahun Baru.

“Bulog harus terus menjaga ketersediaan beras terutama menghadapi Natal dan Tahun baru di penghujung 2018. Kita support dan beri apresiasi,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Saat meninjau gudang, politisi dapil Papua Barat ini turut menyaksikan tumpukan beras yang dihasilkan oleh petani-petani di Papua Barat. Ia pun mengajak masyarakat Papua Barat untuk terus mengutamakan konsumsi beras lokal, demi menjaga kelestarian ekonomi lokal. ■ hs/sf



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (kanan) saat meninjau posko Induk Tanjung dan kerusakan jaringan irigasi tersier Tanjung di Nusa Tenggara Barat (NTB).

## Komisi IV Tinjau Kerusakan Pasca Gempa Lombok

**Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI meninjau Posko Induk Tanjung dan kerusakan jaringan irigasi tersier Tanjung, Kabupaten Lombok Utara akibat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan pemetaan permasalahan dan melihat secara langsung sejauh mana mitra kerja Komisi IV DPR RI bekerja, pasca gempa yang melanda NTB dan sekitarnya.**

**K**unspek yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dan didampingi oleh mitra kerja ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara Saifudin, di peti kemas pengungsian yang disulap menjadi kantor sementara, dikarenakan kantor bupati turut ambruk karena gempa, Rabu (19/09).

“Kami turut berduka cita dan

prihatin kepada seluruh warga NTB yang menjadi korban baik, secara moral maupun materiil. Kami akan mendorong seluruh mitra kerja Komisi IV DPR RI untuk fokus membangun kembali infrastruktur pertanian, kelautan perikanan, dan kehutanan yang hancur akibat gempa,” ujar Edhy di hadapan Wakil Bupati Lombok Utara dan mitra kerja.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku, pihaknya akan segera melakukan rapat dengan mitra kerja terkait, guna membahas hal-hal strategis selanjutnya untuk pemulihan daerah bencana secara cepat dan melakukan tindak pencegahan agar tidak terjadi korban. Ia juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk mendata lebih lanjut berbagai kerusakan di bidang pertanian, kelautan,



Foto: Andri/Rni

# Komisi IX Tinjau Efektivitas UU PPMI di Bali

**Komisi IX DPR RI meninjau efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Komisi IX DPR RI juga ingin melihat dari dekat keselarasan penerapan UU PPMI ini dengan ratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006. Provinsi Bali menjadi salah satu tujuan peninjauan tersebut.**



Foto: Rizka/Rni

Tim Kunspek Komisi IX DPR RI foto bersama mitra kerja usai pertemuan di Bali

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menyampaikan, pihaknya ingin memastikan tak ada kendala yang berarti dari penerapan dua regulasi tersebut. “Kita melakukan kunjungan khusus untuk melihat pekerja migran laut, baik mereka yang bekerja di kapal pesiar, nelayan, dan lain sebagainya. Kita ingin memastikan apakah undang-undang yang sudah kita sahkan efektif atau tidak,” katanya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Bali, Selasa (18/9).

Dari hasil peninjauan, dua regulasi itu baik UU PPMI dan MLC 2006 tidak terjadi benturan di lapangan yang justru akan menghambat para pekerja sendiri. Sebaliknya, dengan regulasi tersebut, para pekerja migran mendapat berbagai kemudahan akses kerja sekaligus perlindungan hukum. Temuan sementara Komisi IX DPR RI, ungkap Ermalena, masih ada tumpang tindih kebijakan di daerah menyangkut regulasi ketenagakerjaan.

“Seluruh pekerja kita di luar negeri harus mendapat perlindungan dari negara. Dan kini Menteri Ketenagakerjaan sedang melakukan pembahasan peraturan turunannya. Tentu ada peraturan pemerintah dan peraturan dari setiap kementerian. Yang harus diingat, kebijakannya harus satu dan dilakukan sinkronisasi. Jangan setiap kementerian mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri. Satu kebijakan, tapi pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing institusi,” papar Anggota F-PPP DPR RI ini.

Ermalena mengingatkan, tumpang tindih kebijakan sekali lagi tidak boleh terjadi, karena akan merugikan para pekerja. Tidak boleh ada ego sektoral dalam mengurus pekerja migran. Aturan pelaksana atas UU PPMI memang belum ada. Dan itu harus segera diterbitkan. Ditegaskan Ermalena, mendapatkan pekerjaan adalah hak asasi manusia (HAM) dan negara menjamin hak warganya tersebut.

Negara, sambung politisi dapil NTB itu, wajib membenahi sistem perlindungan, sehingga pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, dan perlakuan lain yang melanggar HAM. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratmi mengeluhkan masih tumpang tindihnya berbagai peraturan dari Menaker dan Menteri Perhubungan menyangkut pekerja yang bekerja di kapal pesiar. Ini menjadi catatan tersendiri. ■ ran/sf

perikanan, dan kebutuhan akibat gempa Lombok.

“Ada beberapa catatan yang nanti akan kita rapatkan lagi. Namun yang paling mendesak saat ini adalah mengobati rasa trauma masyarakat Lombok, menjaga pasokan bantuan logistik yang menurut penjelasan Wakil Bupati mulai menipis, serta mengantisipasi pergantian musim dari kemarau ke penghujan agar masyarakat yang mengungsi di tenda-tenda tetap nyaman,” kata Edhy.

Politisi dapil Sumatera Selatan itu memastikan, Komisi IV DPR RI secepatnya akan mengadakan rapat dengan mitra terkait, untuk memastikan akurasi data guna membantu pemulihan masyarakat NTB, yang menurutnya belum bisa disebut pasca gempa, karena sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. ■ man/sf

# Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan

**Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, masyarakat Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat secara tegas mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Patimban masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, mereka membutuhkan kepastian agar pemerintah bisa memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan dengan dibangunnya Pelabuhan Patimban ini.**

yang terkait dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan terhadap hak-hak mereka yang harus diperoleh.

“Seluruh pemangku kepentingan sepakat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban, karena menyangkut kepentingan dan masa depan masyarakat Kabupaten Subang ke depan. Masyarakat Patimban, Subang

dan sekitarnya hanya ingin keadilan dan hak mereka terpenuhi dengan nilai yang wajar,” ujar Sigit.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi. Menurutnya, pada prinsipnya masyarakat Desa Patimban menyambut dengan gembira kehadiran Pelabuhan Patimban ini. Karena dengan adanya pelabuhan ini, mereka menyadari bahwa akan memberikan sebuah kemajuan bagi masyarakat sekitarnya.

“Kita berharap agar segera ditentukan jalan tengahnya, agar pembebasan lahan segera tuntas, karena lahan warga yang terkena imbas dari pembangunan Pelabuhan Patimban

ini merupakan lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari,” kata politisi PKS itu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo dalam paparannya mengatakan, pembangunan Pelabuhan Patimban bertujuan mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan. Selain itu, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas kendaraan serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas. ■ skr/sf



Foto: Singgih/Rini

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo (kanan) ketika memimpin Kunspek ke Kabupaten Subang, Jabar.

Demikian diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Subang, Jabar, Jumat (21/9), guna merespon audiensi Paguyuban Tani Berkah Jaya Patimban yang sebelumnya mendatangi Komisi V DPR RI, terkait pembangunan Pelabuhan Patimban. Mereka berharap pembangunan Pelabuhan Patimban dapat melibatkan warga sekitar, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga di Subang.

“Kunjungan kita ke sini selain ingin melihat secara langsung proses

pembangunan Pelabuhan Patimban, juga untuk mendapatkan masukan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar pelabuhan, terkait permasalahan yang ada dalam proses pembangunan Pelabuhan Patimban,” ungkap Sigit di sela-sela pertemuan dengan masyarakat dan pihak terkait di Kantor Camat Pusakanegara, Subang, Jabar.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu memastikan, pihaknya berjanji akan membantu mediasi masyarakat Desa Patimban dengan pihak-pihak



Foto: Azka/Rni

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis saat foto bersama dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN).

## Komisi VIII Sudah Perjuangkan Guru Inpassing

**Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyatakan, sejak tahun 2015 ada dua isu besar yang dihadapi oleh guru-guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemendiknas). Komisi VIII DPR RI pun sudah berusaha sekuat tenaga memperjuangkan guru inpassing ini.**

**P**ermasalahan itu, pertama, terkait gaji yang ditunda namun sudah diselesaikan tahun lalu sebesar Rp 4,6 triliun. Dan tahun 2018 ini ada anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk membayarnya, namun masih ada yang belum terbayar, yaitu tunjangan kinerja (tukin), tapi tetap dianggarkan. Yang kedua, terkait tuntutan status guru inpassing yang meminta untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam keterangannya kepada pers usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9), Iskan mengatakan upaya pihaknya dari sisi anggaran sudah diselesaikan. Bahkan Komisi VIII DPR RI sampai menolak pendirian Universitas Islam Internasional sebelum gaji guru-guru inpassing

dibayarkan.

Terkait tuntutan guru *inpassing* untuk diangkat menjadi ASN, Iskan mengakui, UU ASN yang menjadi kendala. Menurutnya, bukan hanya Komisi VIII DPR RI, sejumlah Komisi DPR RI dan pemerintah dengan dipimpin Pimpinan DPR RI telah melaksanakan Rapat Gabungan guna merumuskan supaya guru non PNS sudah sertifikasi dan sudah punya inpassing bisa diangkat PNS tanpa syarat. "Harapan itu sudah diperjuangkan," tekannya.

Logikanya, tambah legislator Fraksi PKS DPR RI itu, jika semua syarat-syarat sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan lagi keinginan mereka untuk jadi ASN ditolak. "Mereka sudah berjasa puluhan tahun, masa *sih* negara mengakui saja susah. Padahal dari sisi anggaran tidak ada masalah sebagaimana tuntutan PGIN," tandas Iskan.

Menurut legislator dapil Sumut ini, permasalahan pengangkatan honorer

menjadi ASN ini ada di UU dan Peraturan Pemerintah (PP), yang dalam Rapat Gabungan itu sudah ditangani oleh Komisi II, Komisi X dan Komisi terkait lainnya. "Inilah yang nanti akan dibicarakan dengan Kemendiknas dalam rapat kerja mendatang," jelas Iskan menambahkan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menambahkan, dalam pembahasan RAPBN 2017 lalu, Komisi VIII DPR RI tidak akan menyetujuinya, sebelum *inpassing* non PNS itu diselesaikan, bahkan sampai menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kita sudah berjuang setengah mati. PGIN maunya satu, kita sudah perjuangkan sepuluh. Setiap hari kami perjuangkan aspirasi," tegas legislator PDI-Perjuangan itu.

Sebelumnya, Pimpinan PGIN Hadi Suyitno dalam kesempatan itu menyatakan, guru inpassing yang sudah mengabdikan 23 tahun dengan loyalitas sangat tinggi, statusnya masih guru swasta yang belum jelas. Padahal guru inpassing memiliki kualitas standar dan dibuktikan sertifikat sesuai amanat UU Guru dan Dosen.

"Kami mohon di ASN-kan. Ini tidak akan memberatkan APBN karena guru inpassing sudah mendapatkan pembayaran dengan proporsi 50 persen dari yang didapat PNS. Mohon jangan hanya janji dan angin surga dalam forum ini, tapi buktikan bahwa PGIN mohon di PNS-kan," harapnya. ■ mp/sf

# RUU SSKCKR Penting bagi Perkembangan Literasi



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Kunспек ke Perpustakaan Kota Balikpapan.

**Rancangan Undang-Undang Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RUU SSKCKR) yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi X DPR RI ke depannya diharapkan dapat memperluas dan memperdalam kembali gerakan literasi yang saat ini sudah mulai berkembang di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Kalimantan Timur.**

“Mudah-mudahan ini juga memberikan motivasi kepada para penulis dan kepada masyarakat yang ingin memproduksi karya-karya dalam berbagai bentuk, agar lebih banyak dinikmati oleh banyak orang, yaitu dengan

cara disiplin memberikan karya-karyanya ke lembaga terkait, seperti ke perpustakaan,” jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Kunспек Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Kota Balikpapan, Kaltim, Kamis (20/9).

Dalam kesempatan menyerap masukan mengenai RUU SSKCKR ini, salah satu masukan dari masyarakat dan *stakeholders* terkait di Kaltim adalah perlunya bahan-bahan bacaan berkualitas yang dapat diakses dengan mudah hingga masyarakat di pedalaman, daerah-daerah terpencil, perbatasan, hingga pulau-pulau terluar. Terlebih lagi, letak geografis Kalimantan sendiri yang memang memiliki banyak sungai.

“Apalagi biaya untuk mengirimkan buku-buku dan bahan cetak itu sangat mahal. Jadi mudah-mudahan, kalau ada program-program seperti penambahan koleksi, tidak hanya memperhitungkan pengadaan bukunya, tetapi juga pengiriman hingga ke tempat buku tersebut didistribusikan,” papar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Hetifah melanjutkan, saat ini yang menjadi sasaran penting bagi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan literasi. Literasi yang dimaksud bukan hanya sekedar membaca atau membiasakan gemar membaca, tetapi juga untuk bisa lebih memahami dan mengkritisi isi bacaan.

“Sangat disayangkan sekali, apabila ada sekolah-sekolah yang masih belum memiliki perpustakaan. Apalagi ke depan, perpustakaan menjadi salah satu alat transformasi dan menjadi tempat di mana inklusi sosial terjadi. Jadi, harus bisa dipastikan bahwa semua orang dapat mengakses perpustakaan,” jelas Hetifah.

Ini memastikan, Komisi X DPR akan terus berupaya agar seluruh sekolah di Indonesia memiliki perpustakaan dan memiliki koleksi

## UU SSKCKR Sudah Tak Relevan

**Anggota Komisi X DPR RI Anas Thahir menjelaskan, semua karya cetak dan karya rekam merupakan upaya untuk melusuri sejarah pembangunan bangsa dan negara. Akan tetapi payung hukum yang menaunginya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU SSKCKR) sudah tak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya revisi.**

Demikian diungkapkan Anas saat memimpin pertemuan Tim Kunспек Kerja Spesifik (Kunспек) Komisi X DPR RI dengan Sekda Provinsi Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dan Dewan Perpustakaan Daerah Provinsi Riau,

guna menerima masukan terkait revisi RUU SSKCKR di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (20/9).

Pada pertemuan ini, politisi PPP ini mengaku pihaknya banyak menerima masukan agar negara dapat lebih aktif, sehingga proses pendokumentasian dapat tersimpan dengan baik. Bahkan, Komisi X



Tim Kunспек Komisi X DPR RI berdiskusi dengan staf Dinas Perpustakaan Riau

DPR RI mendapat masukan banyak karya besar yang belum terdokumentasi dengan baik.

“Kita mendapat masukan yang luar biasa dari teman-teman daerah, ternyata banyak karya-karya besar anak bangsa kita yang masih tercecer, belum terdokumentasikan dan terhimpun dengan baik. Sehingga

bahan bacaan yang cukup. Apalagi saat ini, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah mengamanatkan agar sebagian dana digunakan untuk pengadaan buku, namun sangat disayangkan, terkadang ruangnya tidak ada.

“Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan pengadaan ruang, terutama di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan *full day school*, karena sebagian besar aktivitas dan kegiatan siswa dilakukan di lingkungan sekolah,” imbuh anggota dapil Kalimantan Timur itu.

Tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah masuknya era digitalisasi dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, masyarakat lebih tertarik untuk mengakses media sosial, ataupun informasi yang dikemas secara menarik atau bergambar, seperti infografis.

“Buku harus menarik dan kontennya juga juga harus disukai anak muda, kemudian juga harus mudah tersedia. Saat ini sudah ada *e-book*, jadi sebenarnya tidak masalah *gadget* digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti mencari sumber informasi terpercaya dan berkualitas. Memang perlu ada literasi digital, supaya masyarakat juga dapat menggunakan *gadget* secara bijak,” jelas Hetifah.

Namun demikian, keberadaan buku secara fisik juga masih sangat diperlukan, mengingat buku atau informasi secara digital bersifat sementara atau dapat hilang di suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, buku yang bersifat konvensional harus tetap diperhatikan dan dilestarikan. ■ ica/sf

mereka meminta agar ke depannya setelah undang-undang ini jadi, bagaimana pemerintah lebih aktif. Jangan biarkan proses pendokumentasian ini berjalan pasif,” papar Anas.

Menurutnya, revisi UU SSKCKR ini harus segera disahkan, karena banyak sekali karya-karya anak Indonesia yang justru digemari oleh orang dari negara lain. “Saya kira undang-undang ini sangat penting, karena dari kita mendapat informasi, banyak sekali karya kita yang digemari oleh orang dari negara lain, hanya karena mereka rajin mencatat dan mendokumentasikan. Kita yang punya hak cipta justru malah lalai dengan ini,” cetus Anas.

Politisi dapil Jawa Timur itu menginginkan juga nantinya revisi UU SSKCKR ini dapat memberikan perlindungan yang memadai, bagi penulis maupun semua komponen masyarakat yang terlibat dalam proses pendokumentasian karya cetak maupun karya rekam. ■ jay/sf

# Komisi X Serap Masukan RUU SSKCKR di Jatim

**Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (F-PKS) memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Rancangan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RUU SSKCKR) guna menyerap masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang UU SSKCKR dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/9).**

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Komisi X DPR RI menyerap masukan dari Akademisi Bidang Informasi dan Teknologi (IT) khususnya ahli dalam bidang pengalihmediaan, Akademisi Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Produser Karya Rekam Audi Visual, Penerbitan, Budayawan, Sejarawan, Pustakawan, dan Pegiat Literasi se-Jawa Timur.

Dijelaskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, urgensi penyusunan RUU SSKCKR adalah negara berkewajiban untuk melindungi seluruh aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karta cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan/atau arsitik sebagai hasil karya bangsa Indonesia.

“Karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa dan memiliki peran penting sebagai tolak ukur indikator kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi dan pelestarian kebudayaan nasional,” jelasnya.

Terlebih, karya cetak dan karya rekam merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional. “Upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa Indonesia. Dalam penyusunan ini, kami banyak mengundang dan mencari masukan dari berbagai pihak, agar UU ini nantinya bermanfaat untuk semua pihak,” tambahnya.

Adapun, manfaat pengaturan RUU adalah terwujudnya 3K. Pertama, kewajiban penerbitan dan produsen karya cetak. Dalam hal ini untuk menyerahkan dokumen karya cetak dan karya rekam kepada peprustakaan nasional dan perpustakaan provinsi.

Kedua, koleksi, dalam hal ini mewujudkan koleksi nasional dan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri

Foto:Ria/Rni

melestatikan sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi. Ketiga, keselamatan/ keamanan, dalam hal ini menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam/ perbuatan manusia.

Di tempat yang sama, perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Kusmiyati selaku Kepala Bidang Deposit, Akuisisi, Pengeolahan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mengatakan, permasalahan tidak terkumpulnya semua karya cetak dan karya rekam di Jatim karena terkendala pembiayaan yang mahal.

“Ada beberapa penulis yang kesulitan mengirim buku, karena terkendala pendanaan yang cukup mahal. Untuk itu kami berharap dalam UU nanti diatur masalah pendanaan ini, sehingga keinginan untuk melestarikan bisa terwujud,” ungkapnya.

Hadir dalam kunspek ini Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri dan Jimmy Demianus dari F-PDI Perjuangan, kemudian Noor Achmad, Melinda Irwanti, Popong Otje Djundjunan, dan Mujib Rohmat dari F-Golkar, Nizar Zahro, Iwan Kurniawan, dan Dwita Ria Gunadi dari F-Gerindra, Anita Jacoba Gah (F-Demokrat), Amran (F-PAN), Dedi Wahid dan Arzeti Bilbina dari F-PKB, dan Ratieh Sanggarwaty (F-PPP). ■ rnm/sf

# Komisi IX Pantau Implementasi UU PPMI di Sumut

**Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, guna mengetahui implementasi atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), khususnya bagi Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan.**



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

**S**aleh menambahkan, tahun 2016 lalu DPR RI juga telah melakukan ratifikasi terhadap Maritime Labour Convention (MLC) 2006, dan diundangkan melalui UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* atau Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006. Untuk itu, pihaknya ingin mengetahui implementasi dua UU itu dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kita ingin melihat sejauh mana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan implementasi terhadap aturan perundang-undangan

itu. Termasuk peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi PMI, khususnya kepada pelaut awak kapal dan pelaut perikanan,” ungkap Saleh saat pertemuan dengan Kepala Syahbandar Belawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala BP3TKI, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumut, di Pelindo I, Medan, Sumut, Selasa (18/9).

Saleh mengatakan, dalam UU PPMI dijelaskan bahwa ABK adalah salah satu pekerja migran khususnya pekerja melaut sampai melewati batas-batas antar negara. Oleh karena itulah, maka mereka memiliki hak untuk dilindungi oleh negara, sebagaimana amanat dari

konstitusi, bahwa tugas negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah negara Indonesia. Menurutnya, persoalan yang sering timbul di sektor ini antara lain terkait kontrak kerja, jam kerja yang tidak sesuai, penggajian di bawah standar dan lemahnya perlindungan hak pekerja.

Politisi PAN itu menjelaskan, Pasal 4 UU PPMI mengatakan bahwa Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan adalah salah satu kategori PMI dimana hak dan perlindungannya dijamin oleh UU. Sementara itu, lanjutnya, sektor pekerjaan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan secara tupoksi juga terkait banyak instansi yang ada di pemerintah, sehingga dibutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan dalam menangani masalah yang dihadapi PMI.

“Tadi dijelaskan bahwa kapal-kapal dari internasional juga merapat ke sini dan di sana ada pekerja asing dan tentu juga ada ABK Indonesia. Karena Pelabuhan Belawan ini adalah salah satu pelabuhan yang sangat bersejarah, tentu kita ingin memastikan perlindungan terhadap mereka sebagaimana diamanatkan oleh aturan perundang-undangan tadi,” imbuh Saleh.

Politisi dapil Sumut itu menekankan, baik UU PPMI maupun UU Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* perlu untuk disosialisasikan. Sehingga pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* dan masyarakat. Karena dengan demikian, nanti masyarakat memiliki pengetahuan yang khusus terkait dengan ini. Dengan begitu mereka bisa menuntut hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan.

“Jadi kita mendorong Pemprov Sumut untuk mengalokasikan sejumlah anggaran untuk melakukan sosialisasi itu kepada masyarakat luas. Dari kunspek ini kami berharap mendapatkan berbagai masukan yang sangat penting dalam upaya perbaikan sistem perlindungan, perbaikan kebijakan dan program pendukung lainnya bagi kesejahteraan PMI, khususnya pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Semoga nanti penanganan kepada tenaga kerja kita atau PMI itu bisa semakin baik,” tutupnya.

■ iw/sf

Fotolivani/Rni

# Komisi IX Temukan Data Pekerja Migran Belum Akurat di Manado

**Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengawasan Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) dan Pelaut Lintas Batas mengungkapkan temuan belum akuratnya data pekerja migran di Provinsi Sulawesi Utara.**

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan pelaut lintas batas berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang belum lama disahkan oleh DPR RI.

“Kedatangan kami ke Manado ini juga bagian dari melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus sosialisasi terhadap UU PPMI. Apakah pemerintah daerah

Legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini menegaskan bahwa menjadi ABK dan pelaut lintas batas merupakan profesi yang cukup diminati karena potensi penghasilannya cukup besar, apalagi jika direkrut kapal asing dengan gaji cukup menggiurkan.

“Selain masalah perlindungan hukum, Komisi IX juga fokus pada kesejahteraan yang diterima para pekerja ABK dan pelaut lintas batas. Apakah gaji yang mereka terima selama ini sudah sesuai dengan standar pendidikan yang mereka miliki,”

bahaya cukup tinggi sehingga perlu mendapat perlindungan dari pemerintah, pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edison Humiang memandang penting perlindungan terhadap hak-hak para pekerja migran sebagai ABK dan pelaut lintas batas. Baik terkait perlindungan hukum maupun standar kelayakan upah yang mereka terima.

“Pemerintah daerah selama ini kesulitan memantau para pekerja migran, terutama ABK dan pelaut lintas batas karena kurangnya data akurat. Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk segera mendapatkan data yang lebih akurat dan valid agar upaya perlindungan para pekerja migran bisa segera terealisasi,” jelas Edison.

Ia menambahkan, dengan kehadiran Tim Kunspek Komisi IX DPR RI maka diharapkan mampu memberikan arahan dan kontribusi dalam pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke

Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengawasan Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) dan Pelaut Lintas Batas ini juga diikuti Anggota Komisi IX DPR RI Yayat Biaro (F-Golkar), Betti Shadiq Pasadigoe (F-Golkar), Zulfikar Achmad (F-Demokrat), Handayani (F-PKB) dan Ali Mahir (F-Nasdem).

Selain Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Sulut Edison Humiang, hadir juga dalam pertemuan ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut, BP3TKI, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulut, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut.

Kemudian, Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Manado, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manado, Asosiasi Pengusaha Pelayaran, Ketua DPD Pergerakan Pelaut Indonesia, Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Sulut. ■ oji/sf



Foto: Oji/Rni

Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri (kedua dari kanan) memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara.

sudah mulai melaksanakan amanah UU tersebut sebagai bentuk upaya bahwa pemerintah hadir dalam masalah-masalah yang dihadapi para pekerja migran kita,” imbuh Syamsul di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Selasa (18/9).

tukas Syamsul.

Menurut data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) jumlah ABK dan pelaut lintas batas di kapal-kapal perikanan mencapai 2,7 juta orang pekerja. Profesi ini memiliki resiko dan



Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia

Foto: Dep/Rni

# Pemerintah Harus Jaga Iklim Investasi Dunia Usaha

**Komisi XI DPR RI mengimbau pemerintah agar dapat menjaga iklim investasi dunia usaha. Dengan kurs dolar Amerika Serikat (AS) yang semakin meningkat, pemerintah harus lebih fokus pada kemandirian dalam negeri. Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan pemerintah harus fokus kepada efisiensi dan *productivity*.**

“Hal itu harus dilakukan secara bersama-sama diseluruh lini. Sehingga bagi orang yang akan berinvestasi untuk membuka usahanya bisa merasakan kenyamanan dan keamanan, karena bisa berusaha di dalam negeri sendiri dengan tenang,” ujar Indah di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/9).

Dikatakan politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, semua pihak harus bersama-sama menciptakan suasana yang *confident* dan lebih mandiri di dalam negeri. “Sehingga kita tidak bergantung lagi pada mata uang asing, tetapi fokus pada kemandirian produktifitas dalam negeri,” tegasnya.

Pada kesempatan pertemuan Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kanwil Jatim, Ditjen Bea Cukai Jatim, dan Pemerintah Provinsi Jatim, hadir pula perwakilan industri rokok PT. HM Sampoerna dan Wismilak.

“Dari situ kita bisa melakukan pengawasan dengan mengidentifikasi hal apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh mitra kerja Komisi XI di lapangan.

Karena upaya yang saat ini kita lakukan adalah meningkatkan penerimaan negara. Dan salah satu sumber penerimaan negara itu selain pajak adalah cukai,” jelas Indah.

Indah mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan rapat tersebut, khususnya kepada Ditjen Pajak. Indah meminta kepada Ditjen Pajak agar tidak hanya fokus kepada sektor cukai dan rokok saja. Menurutnya, sejauh ini industri rokok masih tetap mampu memenuhi target-target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Pada industri rokok, selain kita konsen pada penerimaan negara, kita juga harus memikirkan segi kesehatan masyarakat dari kebiasaan merokok yang dianggap kurang baik dan mengganggu kesehatan, hal itu juga harus ditingkatkan,” tandas Indah.

Dengan demikian, maka secara otomatis tumbuh kesadaran masyarakat yang semakin baik yakni dengan berhenti atau mengurangi konsumsi rokok. “Hal itu juga yang dijadikan alasan yang disampaikan pihak PT. HM Sampoerna bahwa produksinya sudah mulai sedikit menurun. Namun hal tidak menjadi masalah, karena cukai bisa diekstensifikasikan kepada

barang kena cukai lainnya,” tutur Indah.

Politisi dapil Jawa Timur itu juga menyatakan bahwa yang menjadi fokus Komisi XI DPR RI saat ini adalah bagaimana meningkatkan penerimaan negara, utamanya yang ada kaitannya dengan kinerja pemerintah di lapangan.

“Khusus bagi Ditjen Bea cukai dan Pajak yang setiap hari bertemu dengan *tax payers*, mereka diharapkan mampu memberikan layanan yang baik, dan bisa mensinergikan antara Bea Cukai dan Pajak. Sehingga mereka tidak bisa lagi di-*complain* oleh wajib pajak terhadap peraturan dan tindakan-tindakan di lapangan,” imbuhnya.

Indah menilai, saat ini pihak Bea Cukai dan Pajak sudah berada di *track* yang tepat, yaitu bersama-sama memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. “Di Jawa Timur sendiri penerimaan negaranya cukup tinggi. Pemerintah sudah berusaha melakukan yang terbaik dengan memberikan edukasi dan kesadaran membayar pajak dan cukai dengan benar, serta tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Kami berharap penerimaan negara di Provinsi Jatim dapat terus tercapai,” pungkasnya. ■ dep/sf

## Kehadiran PINA Mampu Percepat Investasi Swasta

**Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) hadir sebagai suatu skema fasilitas yang ditujukan untuk mempercepat investasi swasta dalam pembiayaan Proyek Strategis Nasional. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah.**

“Fungsi PINA yang berasal dari tiga konsep, yaitu fasilitas, ekosistem, dan *pipelining* diharapkan mampu mengakomodasi dukung pemerintah

dalam tahap transaksi finansial, konstruksi, dan operasi,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi

XI DPR RI ke Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (20/9).

Seperti di Provinsi Sumatera Utara, menurut informasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, ada beberapa proyek



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan.

Foto: Titara/Rni

# Genjot Pembangunan Infastruktur Tanpa Defisit APBN



Foto: Eko/Rni

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno saat kunjungan kerja Spesifik (Kunspek) ke Semarang.

**Investasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkesinambungan. Dengan investasi yang tepat sasaran, diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah agar berinovasi mencari sumber pembiayaan pembangunan tanpa membuat defisit APBN.**

“Kita harus berpikir mencari langkah-langkah yang inovatif, untuk mencari sumber-sumber pembiayaan non APBN, karena APBN kita sangat terbatas. Begitu kita ingin menggenjot anggaran infrastruktur, maka defisit APBN kita terpaksa harus meningkat,” papar Hendrawan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (20/9).

Kunspek ini mengikutsertakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi

Jateng beserta jajarannya. Hendrawan mengatakan, kunspek ke Jateng ini dimaksudkan untuk menjajaki apa yang dipikirkan Bappenas, sekaligus juga kebutuhan Bappeda. Alternatif apa yang bisa dilakukan untuk sumber-sumber pembiayaan dan investasi non APBN.

“Apakah dengan menerbitkan obligasi daerah, apakah dengan bekerjasama bisnis luar negeri. Jadi macam-macam nanti skemanya. *Government to business, business to business*, dan sebagainya. Nah ini yang sedang dibicarakan,” ujar politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.

Menurutnya, dalam persaingan antar

negara, faktor infrastruktur memainkan peran yang sangat penting. Sementara dalam bidang infrastruktur, Indonesia masih tertinggal. Itu sebabnya biaya logistik nasional masih tinggi, mobilitas barang dan jasa banyak mengalami hambatan, konektivitas antara sentra produksi dengan pasar masih menghadapi kendala.

Dalam kunspek kali ini, Komisi XI DPR RI memfokuskan pembahasan dan peninjauan pada persoalan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Ini merupakan skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan APBN, melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan modal besar, namun dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial.

PINA merupakan alternatif pendanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat guna mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur. Terminologi ini dipopulerkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengingat masifnya pembangunan infrastruktur yang memerlukan pendanaan di luar APBN.

Hendrawan menyadari, kebutuhan masyarakat pada pengembangan infrastruktur cukup tinggi. “Luar biasa, ternyata kebutuhan ril masyarakat terhadap pengembangan infrastruktur ini besar sekali. Dari kebutuhan pembangunan bandara, perluasan bandara, perluasan pelabuhan, sumber air, destinasi wisata dan yang lain-lain,” ungkap politisi dapil Jateng itu. ■ eko/sf

yang difasilitasi oleh PINA dan sudah masuk dalam tahap finalisasi.

“Diantaranya proyek Medan Municipal Transport dengan nilai estimasi kebutuhan pendanaan proyek aebeaar 914 miliar dolar Amerika Serikat, proyek Rumah Sakit Pringadi Medan dengan nilai estimasi kebutuhan pendanaan proyeksi sebesar 57,5 miliar dolar AS, dan proyek Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sumatera Utara dengan kebutuhan investasi sebesar 106 miliar dolar AS,” rincinya.

Lebih lanjut politisi dapil Lampung itu mengatakan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sekitar Rp 4.796,2 Triliun.

Sementara kemampuan pemerintah melakukan pembiayaan untuk infrastruktur melalui APBN dan APBD hanya sebesar 41,25 persen dari total kebutuhan. Dan kemampuan BUMN/BUMD dalam pemenuhan pembiayaan sebesar 22,23 persen sehingga masih terdapat gap sebesar 36,52 persen.

“Oleh karena itu, untuk memenuhi gap pembiayaan infrastruktur ada tiga skema kebijakan/ strategi pembiayaan yang digunakan pemerintah. Pertama, skema pembiayaan melalui APBN atau APBD. Kedua, pembiayaan melalui penugasan

kepada BUMN. Ketiga, pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA),” tandas Marwan.

Pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu juga diikuti Anggota Komisi XI DPR RI Rai Wijaya dan Marsiaman Saragih dari F-PDI Perjuangan, Andi Achmad Dara dan Muhammad Nur Purmasidi dari F-Golkar, Didi Irawadi Syamsudin (F-Demokrat), Refrizal (F-PKS), Amirul Tamim (F-PPP), dan Anarulita Muchtar (F-NasDem). ■ tra/sf

# Museum DPR Kenalkan Sejarah ke Masyarakat Pekalongan

**Bidang Arsip dan Museum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mengikuti pameran bertema “Merawat Kebhinekaan, Menjaga Nasionalisme” yang digelar di Gedung Pertemuan Umum Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada 19 - 25 September 2018. Melalui pameran ini, Museum DPR RI ingin mengenalkan dan memberikan edukasi mengenai sejarah, tugas, dan fungsi DPR RI kepada masyarakat Pekalongan.**

Pameran yang diikuti 24 museum yang ada di seluruh Indonesia ini bertujuan memberikan edukasi kepada generasi penerus bangsa yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet keberlangsungan negara ini dapat menjaga persatuan, serta tidak kehilangan jati diri bangsa meski digempur penjajahan kultur di era globalisasi.

Kepala Bidang Arsip dan Museum DPR RI Endang Suryastuti saat ditemui *Parlementaria* di sela-sela pameran, Sabtu (21/9) menuturkan, pameran tersebut sebagai ajang sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang Museum DPR RI dari masa ke masa, dari zaman Volksraad (1918-1942), pasca reformasi hingga DPR RI sebagai parlemen modern.

Dalam pameran tersebut, Bidang Arsip dan Museum DPR RI membawa berbagai macam benda bersejarah, dari mesin ketik yang digunakan pada periode 1956-1959, perangkat kamera yang digunakan untuk dokumentasi pada tahun 1971, hingga rekaman pita suara pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perjudian Sosial pada tahun 1979.

Dalam pameran tersebut, Endang juga menjelaskan akan terus memperbaiki Museum DPR RI dengan cara menata ulang story line, hingga menambah SDM untuk menunjang kinerja Arsip dan Museum. “Kami akan memperbaiki story line tata pameran yang ada di museum saat ini. Saat ini museum baru menampilkan DPR dari zaman Volksraad hingga tahun 1998. Sementara DPR 20 tahun ke belakang

belum tergambarkan,” tutur Endang.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kolbihi yang berkunjung ke stand Museum DPR RI sangat berterimakasih atas partisipasi Museum DPR RI yang telah ikut andil dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di Pekalongan, khususnya para siswa-siswi.

“Kehadiran museum DPR RI sangat penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anak didik kita, untuk mengetahui tugas pokok, peran serta fungsi anggota DPR RI serta sejarahnya dan anak-anak akan mendapatkan informasi yang utuh dari sumber yang berkompeten,” tutur Asip.

Salah satu siswi yang berkunjung ke stand pameran Museum DPR RI, Novalista Nurul Ilmi menuturkan dengan adanya pameran tersebut dapat memberikan edukasi kepada siswa-siswi yang hadir. “Saya jadi tahu tentang peran, serta fungsi Anggota DPR itu, dan saya tahu mengenai sejarah DPR serta dokumen-dokumen yang ada dan alat yang dipergunakan dalam sidang paripurna,” tutur siswi SMAN 1 Kajen itu. ■ rh/sf



Suasana Stand Bidang Arsip dan Museum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Foto: Ryan/Rri



Foto: Ayu/Rni

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing bersama anggota BURT saat tinjau RS Columbia Asia Medan.

## BURT Apresiasi Fasilitas RS Columbia Asia Medan

**Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing mengapresiasi berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit (RS) Columbia Asia Medan untuk para peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama). Selain diperuntukkan bagi Anggota DPR RI, Jamkestama juga diberikan kepada keluarga Anggota DPR RI.**

“Kedatangan BURT mengunjungi Rumah Sakit Columbia Asia ini khusus untuk mengecek atau mengontrol kesiapan rumah sakit dalam menampung peserta Jamkestama yang notabene merupakan para pejabat negara, seperti Ketua MK, MA, para menteri, termasuk Anggota DPR RI,” kata Anthon saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI mengunjungi RS Columbia Asia, Medan,

Sumatera Utara, Senin (24/9).

Setelah mendapat penjelasan dari pihak RS Columbia Asia Medan, dalam hal ini manajemen dan tenaga medis RS tersebut, serta meninjau langsung beberapa kamar VVIP dan super VVIP yang ditujukan bagi pasien peserta Jamkestama, legislator dari Fraksi Partai Golkar DPR RI ini sangat mengapresiasinya.

Hal yang sama juga diungkapkan

oleh Anggota BURT DPR RI Anshori Siregar yang cukup kagum dengan berbagai fasilitas dan pelayanan di RS tersebut bagi peserta Jamkestama. Keduanya sepakat untuk mensosialisasikan dan merekomendasikan RS Columbia Asia ini bagi pejabat negara lain, baik yang sudah menjadi peserta Jamkestama ataupun belum.

■ ayu/sf



Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima kunjungan Sekjen Mahkamah Konstitusi di Gedung DPR, Rabu (26/9).

Foto: Jaka



Tim Kunker Komisi IX DPR dipimpin Wakil Ketua Saleh Partaonan Daulay memantau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Pelindo I, Medan, Selasa (18/9). Foto: iwan



Kepala Badan Keahlian Dewan DPR Johnson Rajagukguk menjadi narasumber workshop "Peningkatan Supporting System Fungsi Anggaran Melalui Penguatan Organisasi Pusat Kajian Anggaran dengan Dukungan World Bank" di Gedung DPR, Jum'at (28/9). Foto: Jay